

**ENTREPRENEUR UNIVERSITY
SEBAGAI SUATU KAJIAN**

Makalah



Oleh,

Hanif Al Kadri, S.Pd, M.Pd.

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG
DITERIMA : 11-12-13
SUMBER/HARGA : Hd
• EKS kr
• NIVEN ARIS : 207/Hd/2013.E.1(1)
KEMAS

**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan anugerahNya sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Judul makalah ini sangat menarik untuk dibahas mengingat trend perkembangan universitas di abad 21 ini adalah menyiapkan *knolwedge worker* yang memiliki daya adaptasi dengan berbagai perubahan yang akan dihadapi pada saat para mahasiswa lulus dari universitas tempat mereka belajar. Konsep *Entrepreuner University* sebenarnya sudah berkembang pesat di universitas- universitas di negara Amerika dan Eropa, sehingga rasanya perlu dikaji perkembangan entrepreneur univeristy di Indonesia. Apakah kebijakan pendidikan tinggi yang ada sudah memadai untuk mendukung implementasi entrepreneur univeristy.

Menyadari bahwa makalah ini merupakan bagian dari proses penulis untuk memahami kebijakan tentang entrepreneur university, maka pemakalah mengupayakan agar bahasan dalam makalah ini cukup fokus merinci dan mendiskusikan judul topik makalah. Namun demikian penulis mengakui adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki dalam melakukan kajian kebijakan maupun dalam memperkaya kajian isi makalah ini. Tentunya masukan, saran dan dukungan informasi tambahan yang Ibu/Bapak berikan untuk lebih menyempurnakan isi bahasan makalah ini sangat diharapkan.

Padang, April 2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Misi universal universitas adalah mengabdikan kepada kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk tri darma perguruan tinggi, dimana salah satunya adalah riset yang merupakan tanggung jawab *scholar* bahwa ilmu yang disampaikannya itu update dengan perkembangan masyarakat. Jika hasil riset tersebut dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat ataupun diserahkan kepada industri maka hal itu menjadi pengabdian masyarakat.

Disisi lain, keberadaan pendidikan tinggi selain untuk meningkatkan pengetahuan bagi kepentingan individu itu sendiri, juga memiliki peran dalam pusat perekonomian Negara. Misalnya the Global Competitiveness Report 2009-2010 menggunakan indikator *Higher education and training* sebagai pilar kelima. Pada laporan tersebut dinyatakan bahwa: “*Quality higher education and training is crucial for economies that want to move up the value chain beyond simple production processes and products. In particular, today’s globalizing economy requires economies to nurture pools of well-educated workers who are able to adapt rapidly to their changing environment* (WTO, 2009:18). Sejalan dengan laporan tersebut, the International Labour Organization (2011:15) menegaskan bahwa: “*attaining higher education clearly matters for ensuring that workers can find permanent employment*”. Apalagi menyadari bahwa para lulusan perguruan tinggi akan menghadapi perubahan yang terjadi didunia kerja yang dipengaruhi oleh globalisasi, diantaranya *Free Labour Market*. Jadi tidaklah mengherankan jika dalam duapuluh lima tahun belakangan ini sistem dan institusi pendidikan tinggi diberbagai Negara didunia ini melakukan reformasi dan perubahan yang menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Trend terkini terkait reformasi pendidikan tinggi

adalah mengembangkan budaya *entrepreneur* dilingkungan universitas atau yang dikenal dengan istilah menciptakan *Entrepreneur University*.

B. Rumusan Masalah

Entrepreneurship University merupakan salah satu upaya penyelenggara pendidikan tinggi untuk mempersiapkan lulusannya agar mampu berwirausaha. Kemampuan berwirausaha perlu dimiliki lulusan perguruan tinggi agar setelah lulus focus mereka tidak hanya untuk mencari pekerjaan melainkan untuk menciptakan kesempatan kerja melalui kegiatan wirausaha. Melalui kebijakan otonomi perguruan tinggi, pemerintah telah membuka kesempatan bagi perguruan tinggi untuk secara kreatif memanfaatkan setiap peluang yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya. Permasalahannya adalah apakah pendidikan tinggi/universitas yang ada telah menjadi *Entrepreneur University*? Jika jawaban terhadap pertanyaan ini adalah belum, maka pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh universitas (dengan dukungan pemerintah) untuk menjadi *Entrepreneur University*?

C. Tujuan

Berdasarkan judul topik dan pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka dalam makalah ini akan dikaji lebih lanjut mengenai:

1. Pengertian dan kriteria *Entrepreneur University*
2. Mengapa *Entrepreneur University* reformasi menjadi salah satu strategi dalam reformasi pendidikan tinggi?
3. Apa saja yang perlu dilakukan untuk mendukung *Entrepreneur University*?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kajian Pustaka

Pustaka yang mengkaji topic *Entrepreneurship University* cukup banyak dan beragam. Ada pustaka yang membahas mengenai konsep dan teori *Entrepreneurship University* (Clark, 1998; Gibb et al, 2012), *entrepreneur* dan inovasi (Nelles J dan Vorley Tim, 2008). *Entrepreneurial universities*, yang merupakan revolusi kedua dalam misi universitas (Etzkowitz et al., 2000), memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi dibebagai Negara. Univesitas, khususnya *enirepreneurial*, merupakan factor utama dalam "Triple Helix" yaitu hubungan antara University-Industry-Government yang mempromosikan inovasi berbasis ilmu pengetahuan diseluruh dunia (Etzkowitz, 2006).

Salah satu contoh *Entrepreneurship University* adalah Arizona State University yang dipimpin oleh Crow (2008). Universitas yang dipimpinannya tersebut dikembangkan menjadi *Entrepreneurship University* untuk mewujudkan peran pendidikan dalam mempersiapkan warga Negara yang mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang akan dihadapi mereka pada saat mereka lulus. Peluang yang tersedia dari otonomi pendidikan yang dimiliki oleh univesitas memberi kesempatan kepada universitas secara kreatif meningkatkan kemampuan inovasi dan daya saing mereka. Karena itu bahasan di bagian kajian pustaka ini diawali dengan pembahasan mengenai otonomi pendidikan tinggi, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pustaka mengenai konsep *entrepreneur education*.

A.1. Peran Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Otonomi Pendidikan Tinggi

Dalam makalah penelitian tentang pendidikan tinggi di Eropa, Carolyn Campbell and Christina (2002) menyatakan bahwa pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, perlu menjadi pemeran utama dalam mendukung pencarian terhadap perdamaian yang berkelanjutan, rekonsiliasi serta pemberdayaan masyarakat madani. Tantangan yang dihadapi perguruan tinggi diseluruh dunia termasuk upaya menjamin kualitas dan standar pendidikan terhadap peningkatan jumlah peserta didik dengan latarbelakang yang beragam. Proses ini terutama muncul pada akhir abad 20

pada saat timbulnya kesadaran dari berbagai negara bahwa masa depan ekonomi dan sosial mereka sebagian besar bergantung kepada ketersediaan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas bagi sebanyak mungkin masyarakatnya, bukan hanya bagi sebagian kecil masyarakat yang kaya (elit). Ditingkat ASEAN, Perdagangan bebas dibawah *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang berlaku pada tahun 2002 akan mulai diikuti dengan *ASEAN Free Labour Area* (AFLA) pada tahun 2015. Liberalisasi perdagangan dan investasi akan berdampak kepada antara lain perubahan pola dan persyaratan di dunia kerja. Globalisasi ekonomi mendorong terjadinya globalisasi tenaga kerja, dimana daya saing antar negara menjadi fokusnya. Schawb (2009) mendefinisikan daya saing sebagai “ *the set of institution, policies, and factors that determine the level of productivity of a country*”. Sementara perguruan tinggi dan lembaga pelatihan merupakan pilar ke lima dari dua belas pilar daya saing dari Global Competitive Index (GCI), yang menjelaskan bahwa kualitas pendidikan tinggi dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan nilai perekonomian dari sekedar proses produksi dan produknya. Pilar ini mengukur tingkat partisipasi sekolah menengah dan pendidikan tinggi, serta kualitas pendidikan sebagaimana diukur oleh kalangan dunia bisnis (Scawb, 2009). Lebih lanjut Michael E Porter (1998) mengemukakan bahwa keunggulan kompetitif dari setiap negara ditentukan oleh seberapa mampu negara tersebut menciptakan lingkungan yang menumbuhkan daya saing dari setiap aktor didalamnya, khususnya aktor ekonomi.

Sektor pendidikan tinggi di Indonesia sangat beragam, dengan empat kelompok institusi yang berbeda, yaitu Pendidikan Tinggi Negeri, Swasta, Kedinasan dan Keagamaan. Menurut Laporan World Bank (2010), Pendidikan Tinggi di Indonesia mengalami ekspansi yang cepat. Saat ini, jumlah mahasiswa yang terdaftar di institusi pendidikan tinggi nasional sebanyak hampir 5 juta. Peningkatan ini secara khusus terjadi karena tersedianya pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh lembaga swasta. Saat ini terdapat lebih dari 130 institusi Pendidikan Tinggi Negeri dan lebih dari 3.000 lembaga Pendidikan Tinggi Swasta. Meskipun institusi negeri hanya

mencakup 4 persen dari total jumlah lembaga pendidikan tinggi, namun mereka mencakup 32 persen dari total pendaftaran sedangkan sisanya 68 persen terdaftar di lembaga pendidikan tinggi swasta.

Tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan hal yang penting seperti tujuan diselenggarakannya kegiatan lainnya. Keberadaan pendidikan tinggi selain untuk meningkatkan pengetahuan bagi kepentingan individu itu sendiri, juga memiliki peran dalam pusat perekonomian, antara lain:

1. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini maka sektor pendidikan tinggi harus cukup besar, memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, dan responsif terhadap kecepatan perubahan lingkungan eksternal misalnya dunia kerja.
2. Untuk mendukung tersebarnya tujuan nasional dan tanggungjawab sosial. Dalam hal ini maka akses untuk memasuki pendidikan tinggi perlu diperluas, agar dapat memberi kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk pemanfaatannya. Tersedianya akses yang semakin luas akan memberi dukungan yang lebih terhadap pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi, karena tidak ada negara yang sedemikian mampu sehingga dapat menyia-nyiakan bakat/potensi SDM negaranya.

Jadi keberadaan pendidikan tinggi sangat penting dan perlu memperoleh sebesar-besarnya dukungan dari *stakeholder* agar dalam penyelenggaraannya mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, pemerintah membuat kebijakan terkait pemberian otonomi kepada pendidikan tinggi yang diawali tahun 1999, yaitu ketika pemerintah Indonesia mensahkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 untuk memfasilitasi rencana perubahan universitas negeri menjadi universitas yang otonomi atau Universitas Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Otonomi perguruan tinggi ditujukan antara lain untuk: (a) percepatan pengembangan institusi. Hal ini disebabkan terdapat perbedaan kemampuan masing-masing institusi tanpa harus

tergantung satu dengan lainnya, (b) akuntabilitas, (c) transparansi, dan (d) efisiensi pendidikan tinggi.

Dalam rangka melanjutkan kebijakan otonomi pendidikan tinggi, pada tahun 2009 pemerintah kembali menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang "Badan Hukum Pendidikan yang secara luas dikenal sebagai "UU BHP", dengan tujuan untuk menyediakan dasar hukum untuk mempromosikan "otonomi manajemen pendidikan pada institusi formal" di semua tingkat pendidikan. Namun pada tanggal 31 Maret 2010, permohonan judicial review terhadap UU BHP dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian memutuskan untuk mencabut Undang-undang tersebut. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Peraturan Pemerintah tentang BHP tidak selaras dengan amanah UUD 1945 dan menciptakan ketidak pastian hukum.

Selanjutnya dalam rangka mengisi kekosongan hukum tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi karena dicabutnya Undang-undang tentang BHP dan sementara menunggu terbitnya undang-undang baru sebagai penggantinya, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum, yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pada tanggal 10 Agustus 2012 Dewan Perwakilan Rakyat mensahkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dimana pada pasal 65 diatur mengenai Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Pendidikan.

Pada hakekatnya ide Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan adalah untuk memperkuat otonomi perguruan tinggi di Indonesia. **Strategi pertama** adalah memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk berkreasi dan bertindak secara mandiri dan tidak lagi terikat pada birokrasi pemerintah pusat yang tersentralisasi. **Strategi kedua** adalah mendorong pemberdayaan perguruan tinggi agar tidak lagi "cengeng" dengan sepenuhnya bergantung kepada pemerintah. Jadi

ada upaya untuk secara inovatif mengembangkan diri sebagai *entrepreneur* (Bustami Rahman, 2003).

A.2. Konsep *Entrepreneur University*

Pengertian Kewirausahaan dan Pendidikan Kewirausahaan

Pustaka mengenai kewirausahaan cukup banyak, namun masing-masing pustaka memberikan definisi menurut sudut pandang penelitiannya. Hal ini disebabkan istilah kewirausahaan mencakup hal yang kompleks dan belum ada definisi yang diterima secara universal. Diantaranya penelitian Timmons dan Spinelli (2009) menunjukkan bahwa lebih produktif untuk mengarahkan fokus perhatian kepada proses kewirausahaan, yang merupakan jantung kesempatan bagi pengusaha untuk mengeksplorasi sesuatu yang (umumnya) jauh dari karakteristik dan kepribadian pengusaha. Laporan Komisi Eropa tahun 2008 yang berjudul '*Entrepreneurship in higher education, especially within nonbusiness studies*' mendukung definisi berikut: "*Entrepreneurship refers to an individual's ability to turn ideas into action. It includes creativity, innovation and risk taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. This supports everyone in day-to-day life at home and in society, makes employees more aware of the context of their work and better able to seize opportunities, and provides a foundation for entrepreneurs establishing a social or commercial activity*". Bahkan dalam laporan yang sama juga diuraikan mengenai "Program Wirausaha dan modul [yang menawarkan] untuk siswa suatu alat untuk berpikir kreatif, menjadi pemecah masalah yang efektif, menganalisis ide obyektif bisnis, dan berkomunikasi, jaringan, memimpin dan mengevaluasi setiap proyek yang diberikan. Siswa merasa lebih percaya diri tentang pengaturan bisnis mereka sendiri karena mereka sekarang dapat menguji sendiri ide bisnis mereka melalui pendidikan yang didukung lingkungan. Salah satu mitos besar sekitar kewirausahaan adalah bahwa hal kewirausahaan dianggap hanya mementingkan penciptaan bisnis baru. Pada kenyataannya dalam beberapa tahun terakhir "Kebutuhan untuk mengelola perubahan sebagai kesempatan cukup menjelaskan

betapa pentingnya imajinasi dalam kewirausahaan” (Gibb,2005) Pemahaman terkini mengenai kewirausahaan adalah bahwa kewirausahaan bukanlah tipe kepribadian (*personality type*) ataupun tahapan siklus suatu organisasi. Kewirausahaan adalah suatu cara untuk mengelola (*it is a way of managing*). Dalam kenyataannya menurut (Clark,1998) kewirausahaan adalah tentang:

1. Cara berpikir dan berperilaku.
2. Mengidentifikasi peluang.
3. Realisasi nilai (value).
4. Membangun dan belajar dari hubungan kerjasama.
5. Mengumpulkan sumber daya.
6. Menjadi positif dan berani mengambil risiko.
7. Membangun untuk masa depan.

Setelah memahami pengertian kewirausahaan, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan Pendidikan Kewirausahaan? Terkait hal ini Heinonen dan Poikkijoki (2005) mendefinisikan “*Entrepreneurship education refers to activities aimed at developing enterprising or entrepreneurial people and increasing their understanding and knowledge about entrepreneurship and enterprise*”. Dengan demikian tujuan utama dari pendidikan kewirausahaan adalah meningkatkan kemampuan SDM dalam kewirausahaan serta untuk dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kewirausahaan dan perusahaan. Hal ini penting untuk membedakan *Entrepreneurship Education* dengan studi bisnis, sebagaimana dikemukakan dalam laporan Komisi Pendidikan di Eropa bahwa “*Entrepreneurship Education should not be confused with general business and economic studies; its goal is to promote creativity, innovation and self-employment*” dan wirausaha dimungkinkan termasuk unsur-unsur berikut:

1. Mengembangkan sifat-sifat dan keterampilan pribadi yang membentuk dasar pikir dan perilaku kewirausahaan (kreativitas, inisiatif, pengambilan risiko, kemandirian, percaya diri, kepemimpinan, semangat kerjasama tim, dll).

2. Meningkatkan kesadaran siswa tentang wirausaha dan kewirausahaan sebagai kemungkinan pilihan karir.
3. Bekerja pada kegiatan dan perusahaan yang konkrit/ nyata. .
4. Memberikan keterampilan dan pengetahuan bisnis yang spesifik tentang bagaimana cara memulai sebuah usaha dan menjalankannya dengan sukses".

Pandangan terkini dari para peneliti adalah pendidikan kewirausahaan memiliki tiga peran yang tergantung kepada konteksnya adalah (a) untuk belajar memahami tentang kewirausahaan - pengetahuan tentang konsep kewirausahaan (b) untuk belajar berjiwa/berperilaku wirausaha - mengembangkan keterampilan dan kompetensi kewirausahaan dan (c) untuk belajar menjadi seorang pengusaha - pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan yang berkaitan dengan memulai bisnis (start-up) dan penciptaan usaha baru "(Heinonen dan Poikkijoki 2005; Bridge, Hegarty dan Porter 2010). (d) sejauh mana lulusan dapat diharapkan untuk memiliki jiwa dan perilaku kewirausahaan sebagai hasil *Entrepreneurship Education* pasti akan bervariasi dari satu orang ke orang lainnya. Hal ini tergantung pada sejauh mana mereka mampu menunjukkan atau mendemonstrasikan beberapa hal berikut: '... keterampilan, atribut pribadi, kapasitas perilaku dan motivasi yang dapat digunakan dalam konteks apapun (sosial, kerja, rekreasi dll). (e) yang paling menonjol di antara aspek tersebut adalah: intuisi dalam pengambilan keputusan, kapasitas mandiri untuk membuat sesuatu terjadi, besarnya jaringan, inisiatif dalam pengambilan keputusan, identifikasi peluang, pemecahan masalah, pemikiran strategis kreatif, self-efficacy, kemampuan untuk mengatasi ambiguitas dan memiliki empati dengan cara melakukan kewirausahaan, berpikir, merasa, berkomunikasi, mengorganisir dan belajar. (NCEE, 2009).

Universitas dan Pendidikan Kewirausahaan

Jawaban terhadap pertanyaan: "why *Entrepreneurship University*?" dapat dikaji dari penjelasan Allan Gibb, Gay Haskin dan Ian Robertson (2009) dalam artikelnya yang berjudul *Leading Entrepreneurial University*. Sebagaimana telah

dijelaskan bahwa inti konsep kewirausahaan berkaitan dengan menciptakan cara mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas (Casson 1982, Ch. 5). Esensi pemikiran tradisional, (Schumpeter 1934), adalah bahwa kewirausahaan merupakan kegiatan untuk menciptakan dan berkaitan dengan sesuatu yang baru atau kombinasi inovatif dari 'faktor produksi' dan 'cara melakukan sesuatu'. Pendapat Schumpeter mengenai '*creative destruction*', mengarah kepada inovasi dan pembaharuan, yang dimanifestasikan dalam bentuk lingkungan tugas yang tidak menentu dan kompleks bagi anggota suatu sistem. Dengan demikian inisiatif kewirausahaan merupakan kebutuhan dan akan muncul pada lingkungan tugas yang dinamis dengan tingkat perubahan yang tinggi.

Sebaliknya lingkungan yang statis menyediakan lingkungan yang lebih mudah diprediksi dan pola respon birokrasi yang rutin. Perubahan lingkungan dinamis yang dihadapi oleh lembaga pendidikan tinggi dan perubahan lingkungan masyarakat mendorong munculnya pemikiran mengenai pentingnya pendidikan kewirausahaan (Doutriaux dan Barker 1996, Kohler 2006 Wissema 2008). Allan Gibb et al (2009) mencoba untuk menjelaskan karakter perkembangan lingkungan tugas yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam bentuk axis sederhana/kompleks dan tertentu/tidak pasti. Mereka menyoroti cara melihat kemungkinan perubahan konsep 'Excellence' (Corbett 2006, Anggap et al 2008, Huisman 2008, Wissema 2009). Dalam kerangka ini mereka berusaha untuk meringkas tanggapan mereka sebagaimana dibuktikan oleh perkembangan pustaka terkait topic kewirausahaan. Kepastian dalam lingkungan tugas universitas dirasakan semakin berkurang dengan adanya perubahan dalam dukungan pendanaan. Yaitu dengan adanya perubahan system pendanaan yang hampir secara total didukung oleh pemerintah pusat atau daerah kondisi berubah menjadi system pendanaan yang mendorong universitas (dalam hal ini lembaga pendidikan tinggi) untuk berupaya dicari dukungan dana langsung dari sumber-sumber non-publik termasuk biaya kuliah dari mahasiswa, hibah penelitian, uang pembangunan dari daerah, dukungan alumni, industri dan Corporate Social Responsibility, kontrak riset dan lainnya (Williams 2009). Demikian juga yang

dialami oleh pendidikan tinggi di Indonesia. Sejalan dengan penjelasan tersebut, laporan penelitian World Bank yang dilakukan oleh Joachim von Amsberg dkk (2010: 28) menjelaskan salah satu gambaran khas pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia adalah sumber pembiayaan yang terbesar berasal dari rumah tangga atau sumber swasta. Dari 1,2 persen PDB yang dibelanjakan untuk pendidikan tinggi, 0,9 persen dari total PDB, atau tiga perempat dari total pengeluaran merupakan kontribusi dari sumber swasta dan sebagian besar dalam bentuk biaya kuliah dan biaya serta pungutan lainnya. Menurut laporan Bank Dunia, sumbangan swasta adalah salah satu yang tertinggi di kawasan (Asia) dan didunia.

Walaupun di banyak Negara pemerintah tetap menjadi “*key player*”, namun alokasi pendanaan kepada universitas dilakukan dalam bentuk yang “*directive*”, yaitu langsung terkait kegiatan pendidikan seperti penelitian. Dengan demikian peningkatan situasi yang tidak pasti mendorong universitas untuk mencari proporsi pendanaan yang lebih besar dari sumber lain sejalan dengan tekanan untuk menjauh dari lingkungan kerja yang sederhana, bersifat pasti, dan ‘otonom’ (karena ada jaminan dukungan dana publik). Kondisi ini mendorong ademisi untuk “mengejar penelitian” dan memberikan pengajaran yang berkualitas.

Sekarang universitas harus berusaha untuk menunjukkan secara langsung manfaat dan nilai (*value*) yang dapat langsung diterima masyarakat. Pada kondisi seperti demikian maka dorongan untuk menjadi *Entrepreneurship University* menjadi hal yang penting untuk diupayakan. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat sadar akan pentingnya pendidikan kewirausahaan bagi kemajuan sumber daya manusia Indonesia untuk menjawab tantangan masa depan. Dukungan untuk pengembangan *Entrepreneurship University* telah dilakukan oleh pemerintah melalui penerbitan serangkaian kebijakan yang berkaitan dengan kewirausahaan. Diantaranya program mahasiswa wirausaha (PMW), Co-operative, Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K). Program-program tersebut dilaksanakan di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan di beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) hasil seleksi Koordinator Perguruan

Tinggi Swasta (Kopertis) dengan alokasi dana yang berbeda-beda. PMW misalnya bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap atau jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) berbasis Iptek kepada para mahasiswa agar dapat mengubah pola pikir (*mindset*) dari pencari kerja (*job seeker*) menjadi pencipta lapangan pekerjaan (*job creator*) serta menjadi pengusaha yang tangguh dan sukses menghadapi persaingan global. Dalam rangka keberlanjutan, program ini juga bertujuan untuk mendorong kelembagaan perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan program-program kewirausahaan (Sailah, 2009).

Beberapa alasan perlunya *Entrepreneurship University*

Tentunya ada cukup banyak alasan mengapa perlu *Entrepreneurship University*. Allan Gibb et al (2009) menjelaskan 7 aspek yang menjadi pendorong, yaitu:

1. Semakin meningkatnya minat dan upaya masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi, yang berdampak kepada tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pendidikan tinggi yang bermutu. Kondisi ini terjadi tidak hanya di Indonesia, melainkan cenderung dialami juga di Amerika dan Negara-negara di Eropah. *The massification of Higher Education* yang didorong oleh *Employability Agenda* menjadi focus perhatian para peneliti di bidang pendidikan (Rinne dan Koivula 2009).
2. *Employability Agenda* merupakan aspek yang sangat penting, dimana pemerintah telah berkomitmen untuk membuka kesempatan bagi warganegaranya untuk menempuh pendidikan, termasuk ke jenjang pendidikan tinggi. Hal ini tercakup pada butir menimbang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa:”.....sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global”. Hal ini menjadi beban yang cukup besar

untuk pemerintah menyediakan dukungan dana yang memadai agar pendidikan yang diselenggarakan berkualitas. Disisi lain, masyarakat (dalam hal ini mahasiswa) diwajibkan untuk turut menanggung beban biaya pendidikannya melalui berbagai bentuk kontribusi pendanaan, misalnya biaya kuliah per semester. Masyarakat yang telah mengeluarkan biaya pendidikan tentunya berharap bahwa mereka akan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas yang akan mendukung mereka pada saat lulus untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji yang memadai (paling tidak sebagai imbal balik atas biaya yang telah dikeluarkannya selama menempuh pendidikan). Padahal dalam kenyataannya, peningkatan angkatan kerja berpendidikan (tinggi) kurang selaras dengan peningkatan kesempatan kerja. Kondisi ini menyebabkan munculnya angka pengangguran terdidik yang cukup tinggi. Berdasarkan data BPS, Jumlah lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia yang berstatus **penganggur terbuka** pada tahun 2012 adalah sebanyak 634.990, mereka terdiri dari lulusan D I/II/III/akademi sebanyak 196.780 orang dan Universitas sebanyak 438.210 orang. Jumlah lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia yang masuk kedalam kelompok **setengah penganggur** (bekerja dibawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam perminggu) pada tahun 2012 (Sakernas 2012) jumlahnya bahkan lebih besar lagi. Untuk lulusan D I/II/III/akademi sebanyak 687.944 orang dan Universitas sebanyak 1.662.512 orang.

Jumlah pengangguran ini disatu sisi mengindikasikan banyaknya lulusan perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Kemungkinan tidak sesuai dari berbagai aspek, misalnya jeniskeahlian ataupun tingkat keahliannya. Disisi lain kondisi tersebut dapat juga menggambarkan rendahnya ketersediaan kesempatan kerja ataupun rendahnya penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini pada gilirannya menyebabkan penciptaan pasar kerja yang lebih terbuka dan kompetitif bagi lulusan perguruan tinggi, yang kemudian membutuhkan respon lembaga pendidikan untuk meningkatkan “kompetensi” kewirausahaan mereka.

3. Tantangan Globalisasi. Masa depan kesempatan kerja bagi para lulusan, dalam konteks pasar kerja global, ditandai dengan seringnya tersedia kesempatan kerja, jenis pekerjaan dan lokasi kerja yang sering berubah melibatkan tenaga kerja potensial dengan jangka waktu kerja kontrak ataupun terpaksa berwirausaha/*involuntary self employment* (Rajan et al, 1997). Hal ini menuntut kapasitas lulusan untuk mampu berpikir dan bertindak secara lokal maupun global dengan cara wirausaha. Kemampuan mereka untuk mengembangkan kapasitas ini menjadi fungsi dari sifat/karakter universitas itu sendiri serta strategi untuk menjembatani hubungan lokal-global.
4. Strategi Internasionalisasi Universitas. Komitmen untuk mengimplementasikan internasionalisasi melibatkan unsur pengambilan risiko kewirausahaan dan pilihan strategik (Nights, 2003).
5. Konfigurasi *Global Knowledge* telah memberikan nilai tambah kepada universitas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menggalang kerjasama penelitian, pertukaran akademisi, meningkatkan kerjasama dalam program pendidikan jarak jauh, dan sebagainya. Kesemua hal tersebut berpengaruh besar terhadap kapasitas penguasaan multi bahasa. Pengaruh tersebsar terhadap internasionalisasi adalah munculnya *Global Knowledge Economy* (Peter, 2003) yang substansinya dapat dengan mudah diakses melalui internet (Senges, 2007). Web secara efektif telah mencakup monopoli pengetahuan lokal dan nasional yang secara tradisional dinikmati oleh universitas. Hal ini juga telah menciptakan kombinasi dan fokus baru untuk pengetahuan (Delanty, 2001) dalam hal tidak dibedakannya disiplin tradisional dan lebih terbukanya terhadap organisasi pengetahuan berdasarkan “perlu diketahui” dan isu masalah.
6. **Kerjasama Regional dan Lokal.** Peran regional dari perguruan tinggi paling disorot di bidang transfer dan kerjasama pengetahuan (Boucher et al 2003, Charles 2003 dan 2006, IHEP 2007, Arbo dan Benneworth 2008). Hubungan potensial antara kontribusi universitas terhadap inovasi dan kontribusi terhadap pembangunan suatu daerah sudah sangat jelas (Smith 2007). Jaringan kerjasama

ini umumnya tercermin dari fokus pertumbuhan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penelitian, dan pengembangan teknologi dan pengetahuan yang dieksplorasi universitas.

7. Dengan demikian istilah '*Entrepreneurial University*' sering dikaitkan dengan gagasan universitas sebagai pusat inovasi (Sole-Parellada et al, 2001). Tampaknya secara luas konteks bahwa kesuksesan inovasi selalu melibatkan proses yang sangat interaktif antara perguruan tinggi, industri dan pemerintah. Proses keterlibatan seperti ini dikenal dengan istilah Model Triple Helix (Benner dan Sandstrom 2000, Shinn 2002 Leydesdorff dan Meyer 2003, Zhou 2008, Etzkowitz 2008).

Manfaat *Entrepreneurship University*

Mengacu kepada literature dan observasi empiris diketahui bahwa potensi dan manfaat *Entrepreneurship University* untuk institusi maupun individu cukup beragam. Manfaat ini dapat berlaku dalam konteks sosial, akademik dan profesional dari kehidupan individu. Pengembangan pola pikir kewirausahaan dan keterampilan memiliki nilai tertentu dalam penciptaan usaha baru. Ini termasuk penciptaan bisnis, usaha sosial, inisiatif intra-organisasi, dan produksi artistik. Beberapa manfaat potensial diantaranya adalah:

1. Membantu lembaga pendidikan tinggi untuk mencapai tujuannya dan berkembang dalam lingkungan global yang kompetitif yang melibatkan ketidakpastian dan kompleksitas yang tinggi.
2. Membantu dalam menciptakan lebih banyak staf dan mahasiswa yang memiliki pemikiran *entrepreneurial*.
3. Meningkatkan kapasitas lembaga untuk mengembangkan inovasi, kreativitas dan sinergi baru dari sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan transfer pengetahuan (masuk dan keluar).



5. Meningkatkan aktivitas lintas lembaga dan multi-disiplin, sehingga pengetahuan trans-disiplin organisasi menjadi lebih berkembang.
6. Meningkatkan kreatifitas penggunaan pengetahuan dan pengembangan output kegiatan penelitian.
7. Mempromosikan etos belajar melalui tindakan/ praktik.
8. Meningkatkan dan diversifikasi pengajaran dan pengalaman belajar dengan mendorong berkembangnya cara-cara inovatif untuk mengajar dan mendukung pembelajaran.
9. Mempromosikan pengalaman belajar multi-disiplin bagi mahasiswa dan staf dalam subjek yang beragam, sekaligus memperkaya pengalaman mahasiswa di kampus.
10. Meningkatkan kerjasama pascasarjana, kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademiknya, dan ikatan alumni.
11. Membuka kesempatan baru untuk menyebarkan pengetahuan dan keahlian unit fungsional umum dari universitas seperti bimbingan karir dan layanan pendukung lainnya, pusat inkubasi, layanan untuk penempatan mahasiswa dan serikat pekerja serta asosiasi mahasiswa.
12. Meningkatkan keterlibatan lembaga dengan pemangku kepentingan eksternal termasuk masyarakat di daerah, masyarakat luas, pelayanan publik dan perusahaan komersial.
13. Membantu dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan peningkatan dukungan bagi mereka.
14. Memberikan layanan untuk tujuan sosial dan ekonomi lokal, regional, nasional dan global.
15. Meningkatkan reputasi lembaga, keberadaan dan posisi kompetitif.

Pengembangan dan implementasi *Entrepreneurship University*

Di Amerika Serikat, pendidikan kewirausahaan di pendidikan tinggi telah tumbuh secara dramatis sejak awal tahun 1980. Pada tahun 2001, kutipan sebuah laporan OECD menuliskan: “*today a person must make some effort to avoid entrepreneurship awareness or training*”. Hal yang sama berlaku di Inggris di mana terdapat berbagai perusahaan dan kegiatan kewirausahaan di banyak universitas dan pendidikan tinggi yang secara luas dapat dinyatakan sebagai bagian dari lingkungan kewirausahaan pendidikan tinggi. Hal ini didukung dan didorong oleh organisasi nasional seperti Dewan Nasional untuk Kewirausahaan Pascasarjana (NCGE) yang sekarang dikenal sebagai Pusat Nasional untuk Kewirausahaan di Pendidikan (NCEE). Menurut NCEE (2010) “Kondisi tersebut merupakan tanda yang optimis untuk membuktikan bahwa semua institusi pendidikan di Inggris sekarang telah menganut konsep kewirausahaan yang diwujudkan dalam pernyataan misi, rencana aksi dan kebijakan strategik di mana *student enterprise* didukung dengan pertumbuhan kelompok penguasa”.

Pemahaman mengenai proses pengembangan dan cara implementasi *Entrepreneurship University* akan menjadi lebih mudah jika digunakan suatu contoh kasus sebagai acuan pembelajaran. Burton Clark (2004) mungkin merupakan penulis yang paling berpengaruh dalam bidang *Entrepreneurship University* berpendapat bahwa berdasarkan sejumlah studi kasus (termasuk dua universitas di Inggris), terdapat lima komponen utama dalam organisasi kewirausahaan di universitas:

- a. Kepemimpinan ditingkat pusat harus kuat untuk merangkul kelompok manajemen dan akademisi
- b. Perluasan pengembangan lingkungan terpinggir dalam universitas melibatkan pertumbuhan unit yang daya jangkauannya melampaui wilayah tradisional dalam universitas
- c. Keragaman dalam basis pendanaan, tidak hanya menggunakan aliran ketiga dana pemerintah, melainkan dari berbagai sumber

- d. Mendorong “jantung” akademik melalui komitmen akademisi terhadap konsep kewirausahaan, dan
- e. Mengintegrasikan definisi budaya wirausaha dalam bentuk komitmen bersama untuk melakukan perubahan

B. *Entrepreneurship University* di Indonesia

Bagian ini menguraikan secara singkat dan sederhana mengenai upaya-upaya pemerintah dan pendidikan tinggi untuk berkembang ke arah *Entrepreneurship University*. Mengacu kepada uraian mengenai pengertian *Entrepreneurship University* serta contoh pengembangannya yang telah dibahas sebelumnya, maka bahasan mengenai *Entrepreneurship University* yang diselenggarakan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1. Kebijakan pemerintah.

Gerakan kewirausahaan sudah diupayakan oleh pemerintah sejak tahun 1995 melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995 yang mencanangkan Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Tujuannya untuk menumbuhkan budaya kreatif, inovatif, di masyarakat, baik di kalangan dunia usaha, pendidikan, maupun aparatur pemerintah. Namun, dalam perjalanannya gerakan tersebut kurang mendapat dukungan (Dinas DIY, 2008). Program yang dijalankan pemerintah dalam mengimplementasikan Inpres tersebut kurang terfokus dengan optimal, karena setelah program selesai dilaksanakan tidak ada kelanjutannya. Padahal program tersebut diadakan sebagai *stra-up* yang diharapkan akan terus berkembang. Contohnya program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) dari Departemen Pendidikan Nasional; serta Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Banyak sarjana peserta program TKPMP ataupun SP3 yang, setelah proyek selesai, tidak menjadi wiraswasta tapi kembali menjadi pencari kerja. Walaupun data tertulis untuk itu belum ada, secara umum data Badan Pusat Statistik

pada 2004 menunjukkan mayoritas alumni universitas bekerja sebagai karyawan (83,1 persen), sedangkan yang berwiraswasta tanpa dibantu hanya 5,8 persen. Sebagai pelengkap program-program yang telah ada sebelumnya, sejak tahun 2009 Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) untuk dilaksanakan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Program tersebut dilaksanakan di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan di beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) hasil diseleksi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dengan alokasi dana yang berbeda-beda (Sailah, 2009).

Hal yang menarik dalam menyimak kebijakan pemerintah ini adalah belum terlihatnya upaya yang terintegrasi dalam bentuk kebijakan terkait kewirausahaan di pendidikan tinggi. Program-program yang tersedia terlihat “parsial” sebagai program yang sifatnya cenderung diperlakukan “*hit and run*” dengan dukungan dana dari pemerintah. Contohnya Program Mahasiswa Wirausaha, yang memunculkan pertanyaan bagaimana keterkaitan program tersebut dengan perencanaan “kewirausahaan” mahasiswa dari awal (dasar) sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan lulus dan mengimplementasikan kewirausahaannya. Apakah PMW juga mencakup pembekalan peningkatan kompetensi kewirausahaan mahasiswa yang terintegrasi dengan kurikulum program studi yang ditempuhnya? Dimana para mahasiswa tersebut memperoleh pengalaman praktis dari lapangan?

2. Upaya pendidikan tinggi membangun *Entrepreneurship*.

Universitas di Indonesia sebenarnya sudah sejak lama mengembangkan kewirausahaan dikalangan civitas akademiknya. Mengacu kepada kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan terkait kewirausahaan, maka dapat dilihat bahwa penyelenggara pendidikan tinggi terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, diantaranya dengan mendorong jiwa kewirausahaan dari para civitas akademisi perguruan tinggi. Bagi dosen, jiwa *entrepreneursip* didorong melalui penguatan penelitian dan kerjasama dengan industry. Misalnya penelitian incubator kewirausahaan. Sedangkan bagi mahasiswa

jiwa entrepreneursip didorong melalui penyelenggaraan mata kuliah Kewirausahaan yang diberikan kepada mahasiswa di hampir semua jurusan. Tidak hanya di jurusan yang berkaitan dengan bisnis atau administrasi niaga, melainkan juga di jurusan yang terkait dengan teknologi. Bahkan melalui kebijakan terkini yang diterbitkan pada tahun 2013 mata kuliah kewirausahaan dinyatakan sebagai mata kuliah wajib dengan bobot 2 sks.

Salah satu program yang layak dijadikan proyek percontohan dalam upaya pengembangan kewirausahaan di kalangan kampus adalah Pusat Inkubator Institut Teknologi Bandung (PI-ITB). Strategi mereka antara lain pengisuan (*sounding*) kewirausahaan melalui seminar, lalu kunjungan lapangan, diskusi, tatap muka dengan pengusaha yang berpengalaman, dan penerbitan majalah *Entrepreneur Indonesia*. Selain itu, dilakukan strategi pendampingan calon pewirausaha dalam bentuk penyediaan fasilitas usaha, konsultasi manajerial dan operasional, pelatihan-pelatihan, dan lain sebagainya. Pusat Inkubator ITB adalah contoh yang baik. Namun, karena PI-ITB kurang memiliki jaringan (*network*) dengan pasar dan lembaga pembiayaan, mereka kurang optimal dalam mempersiapkan lulusan perguruan tinggi menjadi wirausaha (Dinas Pendidikan DIYogyakarta, 2009).

Permasalahannya, tujuan untuk menciptakan lulusan yang berjiwa wirausaha tidak dapat dianggap sederhana yang dapat diatasi secara parsial dengan jalan pintas melalui pemberlakuan kebijakan mewajibkan pengajaran mata kuliah kewirausahaan di perguruan tinggi dalam waktu satu atau dua semester saja. Apalagi jika pengajar mata kuliah kewirausahaanpun kurang memiliki kompetensi ataupun pengalaman dalam melakukan kewirausahaan yang berhasil/sukses. Berkenaan dengan hal ini, beberapa hambatan berikut perlu dijadikan pertimbangan oleh universitas jika sungguh-sungguh ingin menjadi *Entrepreneurship University*:

1. Upaya untuk mengubah paradigma pemikiran (*mindset*), dari berpikir dan bertindak sebagai pekerja/ bawahan menjadi berpikir sebagai wirausahawan. Banyak sarjana (dan orang tua mereka) yang masih berpikir sekolah setinggi mungkin agar dapat pekerjaan yang bagus dengan gaji yang besar. Artinya setelah lulus mencari

pekerjaan terbaik, bukan menciptakan pekerjaan. Bahkan *mind set* penyelenggara pendidikan tinggi juga masih cenderung lebih banyak berpola pikir mempersiapkan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan belum. Artinya belum sepenuhnya memikirkan penyiapan lulusan untuk wirausaha. Jadi paradig berpikirnya cenderung menempatkan posisi kewirausahaan sebagai kompetensi pelengkap belum menjadi kompetensi inti (*core*) dalam tujuan pendidikan.

2. Sebagai dampak paradig berpikir sedemikian, maka kurikulum kewirausahaan yang merupakan “jantung” pembelajaran dari proses penguasaan kompetensi *entrepreneurship* belum direncanakan dengan utuh dan terintegrasi. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kurikulum yang lebih menonjolkan aspek pengetahuan (*cognitive*) daripada sikap maupun keterampilan berwirausaha (*attitude*). Kondisi yang demikian mengakibatkan lulusan perguruan tinggi hanya memahami aspek kewirausahaan pada tataran teori. Bahkan dipahami bahwa sekolah bisnis di Indonesia belum berorientasi mencetak wirausaha baru atau lulusan yang memiliki usaha sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dari latar belakang mahasiswa yang masuk ke sekolah bisnis tersebut, khususnya S2, umumnya mayoritas adalah karyawan perusahaan besar. Artinya, target pasar sekolah bisnis masih pada karyawan perusahaan besar dan bukan individu yang ingin menjadi pengusaha. *Mindset* pengelola penyelenggara pendidikan yang demikian tentu tidak sejalan dengan semangat penumbuhan kewirausahaan.

Kurang *integrated link* antara penyelenggara perguruan tinggi dan lembaga pembiayaan serta pemasaran menjadikan pengembangan semangat serta kemampuan berwirausaha menjadi lebih sulit. Sebetulnya banyak mahasiswa yang telah menghasilkan inovasi baru sebagai hasil pembelajarannya, misalnya hasil penelitian pada saat membuat skripsi, tesis atau disertasi. Namun sayangnya inovasi tersebut tidak berlanjut menjadi suatu produk atau jasa yang dapat dipasarkan dengan baik. Ini merupakan suatu indikasi belum adanya *integrated link* serta belum adanya jiwa dan semangat *entrepreneurship* pada penyelenggara perguruan tinggi.

3. Peranan masyarakat industry maupun masyarakat umum.

- a. Pendidikan kewirausahaan di Indonesia masih kurang memperoleh perhatian yang cukup memadai, baik oleh dunia pendidikan maupun masyarakat. Harapan masyarakat terhadap pendidikan tinggi adalah tersedianya lulusan yang berkualitas untuk mengisi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya.
- b. Selain itu, lingkungan keluarga turut membentuk pola pikir dan semangat kewirausahaan. Pada keluarga atau suku tertentu, jiwa kewirausahaan sudah dikembangkan dan dipersiapkan sejak dini. Misalnya keluarga yang secara turun temurun telah memiliki perusahaan, atau suku keturunan Cina/Tionghoa, Minang, Tasik dan sebagainya yang bidang keahliannya memang berdagang dibandingkan dengan yang bertani. Bidang wirausaha hanya dimanfaatkan sebagai “usaha sampingan” ataupun dilakukan karena ada “musibah” misalnya kebutuhan dana yang besar secara mendadak. Artinya kegiatan kewirausahaan belum dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan utuh.
- c. Konsepsi berpikir umum yang menganggap bahwa kegiatan kewirausahaan memerlukan dana yang tinggi/banyak dan mengandung banyak resiko terjadinya kegagalan juga turut menjadi salah satu aspek yang kurang membuka dukungan masyarakat terhadap kegiatan wirausaha di lingkungan pendidikan tinggi.



BAB III KESIMPULAN

Fenomena sekarang menunjukkan bahwa kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang dapat dipelajari dan diajarkan. Jiwa wirausaha diharapkan menjadi kerangka berpikir (*mind set*) generasi muda di tengah keterbatasan pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja saat ini. Artinya pendidikan tinggi perlu mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan dikalangan mahasiswa sebagai generasi muda bangsa.

Kegiatan kewirausahaan merupakan kegiatan yang sangat menjanjikan kesejahteraan bagi pelaksananya. Karena itu kegiatan kewirausahaan perlu dipersiapkan dengan perencanaan yang matang dan utuh. Walaupun disadari bahwa kewirausahaan merupakan bidang yang dapat dilakukan oleh semua orang, bahkan oleh orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi sekalipun. Untuk sejumlah orang (yang terbatas) hal ini dimungkinkan berhasil dengan sangat baik, namun bagi sebagian besar orang pembekalan mengenai cara dan pengalaman berwirausaha perlu dipelajari terlebih dahulu, misalnya melalui pendidikan.

Mempelajari cara Arizona State University mengembangkan diri menjadi *Entrepreneurial University*, dapat dipahami bahwa menciptakan *Entrepreneurial University* merupakan tugas multi-level dimana kesemua level saling berkaitan dan saling mendukung satu dengan lainnya. Seperti halnya individu, untuk menjadi *Entrepreneurship University* maka lembaga pendidikan tinggipun perlu memiliki perencanaan yang matang dan saling terintegrasi dengan utuh. Adapun tahapannya adalah:

1. Dimulai dari penentuan landasan disiplin akademik kewirausahaan yang diusahakan untuk melibatkan semua program studi dan jurusan. Bukan hanya melalui pengajaran mata kuliah kewirausahaan untuk semua disiplin ilmu, namun lebih jauh dari itu adalah untuk menanamkan peluang kewirausahaan dilingkungan masing-masing jurusan.

2. Pada tingkat berikutnya, mulai memfasilitasi serangkaian inisiatif yang diarahkan untuk membantu usaha kewirausahaan diluar lingkungan kerja. Misalnya inisiatif kegiatan wirausaha bagi mahasiswa dengan dukungna dana dari perguruan tinggi. Selain itu inisiatif kegiatan usaha yang menyatukan pengusaha, pemodal ventura, dan pemikir kreatif di wilayah sekita universitas dalam usaha bersama.
3. Menginisiasi dan mengkonsep rancangan hub untuk mendorong pengetahuan industri, inovasi dibidang teknologi, dan aktivitas komersial dengan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah.
4. Menerapkan sejumlah kebijakan institusional yang mendorong meningkatnya budaya kewirausahaan yang berkelanjutan dan membuatnya lebih mudah untuk memindahkan ide menjadi tindakan, konsisten dengan kebijakan yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan komersialisasi kekayaan intelektual.
5. Mengembangkan dukungan jaringan. Misalnya konektivitas ekosistem jaringan yang menciptakan banyak jalur bagi orang untuk memindahkan ide dari konsepsi menjadi kenyataan. Yaitu yang memungkinkan semua elemen bekerja sama dengan pemahaman yang sama dan utuh mengenai infrastruktur inovasi dimana universitas menjadi bagian dari ekologi inovasi yang luas.
6. Menciptakan model kerjasama investasi, sekaligus mengubah paradigam dan pola pikir institusional. Misalnya model investasi yang mengatur jika salah satu sektor swasta atau masyarakat bersedia untuk memberikan dukungan investasi ataupun dukungan politiknya, maka universitas akan berupaya agar dapat memberikan pengembalian atas investasi yang diberikan tersebut. Model dukungan investasi akan menempatkan universitas dalam posisi yang lebih baik untuk bersaing dalam mendapatkan dukungan dana penelitian. Terbukanya dukungan dana ini akan meningkatkan kemampuan universitas untuk lebih mengembangkan kemampuan penelitian dasar, sekaligus menunjukkan kemampuan kewirausahaannya. Baik dari segi keilmuan maupun manfaat praktis aplikasinya. Hal ini sangat berharga untuk para sponsor yang ingin melihat tidak hanya

penemuan pengetahuan baru, tetapi juga manfaat yang nyata dari hasil-hasil penelitian.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa untuk menjadi *Entrepreneurial University* hal pertama yang perlu diyakinkan adalah dimilikinya paradigm berpikir kewirausahaan. Paradigma yang telah terinternalisasikan dalam kepribadian individu akan dapat dilihat dalam wujud perilaku kewirausahaan. Hal ini perlu dimulai dari *top level management* yang kemudian akan menggerakkan dan mengarahkan semua tingkatan pekerja agar memiliki wawasan dan bertindak dengan jiwa dan semangat kewirausahaan.

Kuncinya adalah 5 S yaitu: Strategi, Struktur Organisasi perguruan tinggi, Sumber Daya Manusia yang kompeten, Sistem serta target dan kecepatan produksi ataupun layanan.

Pendidikan kewirausahaan mesti berjalan secara berkesinambungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses pendidikan di perguruan tinggi. Dalam kenyataannya, pendidikan kewirausahaan umumnya dikaitkan dengan upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terdidik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Carolyn Campbell and Christina Rozsnyai, (2002), *Quality Assurance and the Development of Course Programmes*, Paper on Higher Education, Bucharest, UNESCO.
2. Clark, B. R. (1998). *Creating entrepreneurial universities*. Oxford, Pergamon.
3. Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the entrepreneurial university. *International Journal of Technology and Globalization*, 1(1), 64-77.
4. Etzkowitz, H. (2006). Triple Helix twins: innovation and sustainability. *Science and Public Policy*, 33(1), 77-83.
5. Gibb, A., Haskins, G., & Robertson, I. (2009). *Leading the entrepreneurial university: Meeting the entrepreneurial development needs of higher education institutions*. Said Business School, University of Oxford.
6. Gibb, A.A. (2005) 'Towards the Entrepreneurial University. Entrepreneurship Education as a lever for change'. NCGE Policy paper series www.ncge.org.uk.
7. Gibb, A.A. (2006) 'Entrepreneurship. Unique Solutions for Unique Environments. Can this be achieved with the existing paradigm?' Paper as background to Plenary presentation ICSB World Conference Melbourne Australia June 2006 (conference website).
8. Higher Education and Training Award Council, 2011, Enterprise and Entrepreneurship Education, (http://www.heai.ie/files/files/DES_Higher_Ed_Main_Report.pdf).
9. Joachim von Amsberg, Emmanuel Jimenez, Eduardo Velez, Mae Chu Chang, and Dandan Chen, (2010), *Indonesia: Higher Education Financing Human Development, East Asia and Pacific Region*, World Bank.
10. Nelles Jen dan Tim Vorley, (2008), *Entrepreneurship and innovation – Organization Institutions, System and Regions*, CBS, Denmark.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
12. Porter Michael E, (1998), *The competitive Advantage of the Nation*, London: MacMillan. In Nugroho Riant, 2008, *Public Policy*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
13. Schwab Klaus, (2009), *The Global Competitive Report*, World Economic Forum, Genewa, Switzerland.
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
16. World Bank, (2010), *Indonesia: Higher Education Financing Human Development*, East Asia and Pacific Region.
17. WTO, (2009), *The WTO and the University: Globalization, GATS, and the American Higher Education*.

